

**STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN
RI. NO. 54 TAHUN 2010 DENGAN FOKUS METODE PENGADAAN
LANGSUNG DAN SWAKELOLA BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD ALIHANAFIAH
NPM. 121801032**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Presiden RI. No. 54 Tahun 2010 dengan Fokus Metode Pengadaan Langsung dan Swakelola Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Medan

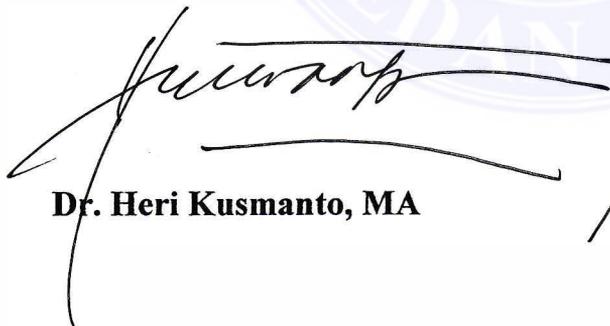
Nama : Muhammad Alihanafiah

NPM : 121801032

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA



Muaz Zul, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjio, MA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 11 Juni 2014

Nama : Muhammad Alihanafiah

NPM : 121801032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Muaz Zul, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Drs. Safrin, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2014

Yang menyatakan,




Muhammad Alihanafiah

ABSTRACTION

IMPLEMENTATION STUDY OF PERATURAN PRESIDEN RI NO. 54 TAHUN 2010 FOCUSED ON GOVERNMENT GOODS AND SERVICE DIRECT AND SELF MANAGED PROCURING AT ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DEPARTMENT OF MAJOR SECRETARY MEDAN CITY

Name : MUHAMMAD ALIHANAFIAH
Student Id. Number : 121801032
Program : Magister Public Administration
1 st Lecturer : Dr. Heri Kusmanto, MA
2 nd Lecturer : Muaz Zul SH. M.Hum

One of the most important issues who always come up to mass media today is about procuring of government goods and services are made to fulfil need of people concerning about completeness service who done by birocrates or social institutions.

Infact, In procuring of government goods and services, abuse of power and missed procedure who caused birocrate or bussines persons asserted in the court always occurred.

This research is referred to know what are the problems and any possibility to take in government goods and sevices procuring, specially direct procuring and self managed government goods and service in Administrasi Kemasyarakatan department of major secretary Medan.

Type of this research is combining descriptive qualitative an quantitative method. It's merged qualitative analysis from responden interview with simple tabulation result of distributing questioner.

The frame work of theory which is used to analyse the problem in this research are based on Implementation Theory by George C. Edward and supported by social expert conception like Dunn.WD., Van Meter Van Horn and regulation of Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah and other regulations.

This research focused on the method of government goods and service procuring, specially direct and self managed procuring.

Result of research shows that the implementation of Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah not run well . Some of indicators did not be done optimal like implementation variables, operational standard procedure on this unit were not good. Some of others indicators such as no standard operational procedure, low transparation, no defined recruitment system, no defined distribution of power and responsible, lacked of personil , low ability of staf , no obedient implementor, different perception of implementers, reward and punishment considered still not satisfied people in government goods and seVICES procuring.

This phenomenon affect the quality of government goods and services procuring process, inspite of all weakness and risk canbe occurred.

Key words: Implementation, Perpres No. 54 Tahun 2010, government goods and services, direct and self management procuring.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ **STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NO. 54 TAHUN 2010 DENGAN FOKUS METODE PENGADAAN LANGSUNG DAN SWAKELOLA BARANG/ JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN** ”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai Gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area .

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, yang telah membantu penulis sampai tersusunnya tesis ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Heri Kusmanto, MA. dan Muaz Zul SH. M.Hum yang bertindak sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Warjio, MA selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan , Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area , dan kepada Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area , yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti program pascasarjana di Universitas Medan Area di Medan .

Rasa terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Walikota Medan beserta jajarannya dan Pemerintah Kota Medan atas Izin Belajar dan kesempatan belajar yang diberikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan beserta Staf Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Medan dan semua pihak yang menjadi lokasi penelitian.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat di Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area atas kebersamaan dan persahabatan yang indah selama ini. Juga kepada semua rekan dan sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini.

Dan tentu saja, Penulis menyampaikan beribu rasa terima kasih kepada orang tuaku, Alm Drs. H. Bachrizal , Ibu Almh. Hj. Jemidah, Alm. Bapak Ahmad Sanwani , dan Ibu Almh. Halimah yang telah menjadi inspirator dan pemacu semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Demikian juga rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Istriku Rukiah serta anak-anakku tersayang Rifky,Raditya, Puteri dan Fajri atas kasih sayang, kesabaran, pengertian dan pengorbanannya sehingga Penulis dapat melakukan studi dan penelitian hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi para pihak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Medan, April 2014

Muhammad Alihanafiah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :

“STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NO. 54 TAHUN 2010 DENGAN FOKUS METODE PENGADAAN LANGSUNG DAN SWAKELOLA BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN ”

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Heri Kusmanto, MA. Dan Muaz Zul SH. M.Hum
5. Ayah dan Ibunda serta isteri, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area se-angkatan Tahun 2012 .
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Walikota Medan beserta seluruh jajarannya.
9. Pimpinan dan staf Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Medan.
10. Responden yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Kerangka Pemikiran	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Makna Implementasi	15
2. Makna Pengadaan Barang dan Jasa	28
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	31
A. Sejarah Singkat Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ..	31
B. Fungsi Pemerintah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	33
C. Maksud dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	34
D. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	34
E. Pengadaan Langsung dan Swakelola.....	39
F. Bentuk, Tugas dan Wewenang Organisasi Pengadaan	42
G. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.....	46
H. Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.....	48
I. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	51
J. Pengaturan Teknis Operasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	55
BAB III. METODE PENELITIAN	
1. Tempat dan Waktu Penelitian	56
2. Bentuk Penelitian	57
3. Populasi dan Sampel.....	58
4. Teknik Pengumpulan Data	59
5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	61
6. Teknik Analisis Data	66
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN , HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	68

B. Profil Kepegawaian	71
2. Implementasi Program Kerja dan Kinerja Unit Kerja	
A. Alokasi dan Realisasi Anggaran	72
B. Implementasi Program dan Kegiatan	73
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Analisa Implementasi Pengadaan Langsung dan Swakelola	
1. Struktur Birokrasi	76
2. Sumber Daya	90
3. Disposisi Pelaksana	102
4. Komunikasi	109

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Kesimpulan	118
2. Implikasi Kebijakan.....	119

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data
4. Kuesioner

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tabel Temuan Kasus PBJ yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Nerara/Daerah/Perusahaan	5
Tabel 2. Variabel,Indikator dan Sub Indikator Penelitian	61
Tabel 3. Profil Kepegawaian	71
Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2012	72
Tabel 5. Tingkat Ketersediaan Standard Operasional Prosedur Dalam Pengadaaan Langsung dan Swakelola	77
Tabel 6. Tingkat Kejelasan/Keterbukaan Prosedur Pengadaan Langsung dan Swakelola.....	79
Tabel 7. Tingkat Kepastian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Langsung dan Swakelola	80
Tabel 8. Tingkat Kemudahan Prosedur Dalam Proses Pengadaan Langsung dan Swakelola	81
Tabel 9. Tingkat Kejelasan Sistem Rekrutmen Pejabat Dalam Proses Pengadaan Langsung dan Swakelola	82
Tabel 10. Tingkat Kejelasan Sistem Penggajian Dalam Proses Pengadaan Langsung dan Swakelola	83
Tabel 11. Tingkat Kepatuhan Terhadap Peraturan Dalam Pengadaan Langsung dan Swakelola	84
Tabel 12. Tingkat Kejelasan System Penghargaan Dalam Proses Pengadaan Langsung dan Swakelola	86
Tabel 13. Tingkat Kejelasan/Keterbukaan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Pengadaan Langsung dan Swakelola	88
Tabel 14. Tingkat Kepastian Tanggung Jawab Pengadaan Langsung dan Swakelola	89
Tabel 15. Tingkat Kejelasan Hirarchi Jabatan Dalam Pengadaan Langsung dan Swakelola	90
Tabel 16. Tingkat Kecukupan Personil/Staf Dalam Pengadaan Langsung dan Swakelola	91
Tabel 17. Tingkat Kemampuan Staf Dalam Proses Pengadaan Langsung dan Swakelola	92
Tabel 18. Tingkat Kejelasan Informasi Dalam Proses Pengadaan Langsung dan Swakelola	93
Tabel 19. Tingkat Keterbukaan Informasi Dalam Pengadaan Langsung dan Swakelola	94
Tabel 20. Tingkat Kepatuhan Implementor Terhadap Informasi Pengadaan Langsung dan Swakelola	95
Tabel 21. Tingkat Kejelasan Wewenang Dalam Pengadaan Langsung dan Swakelola	97
Tabel 22. Tingkat Kepastian Wewenang Dalam Pengadaan Langsung dan Swakelola	98

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan sosial politik dan pemerintahan, terutama sejak bergulirnya Reformasi Tahun 1998, harapan masyarakat akan hadirnya sebuah pemerintahan yang kredibel dan melayani sangat didambakan. Bahkan aktualisasi harapan dan impian tersebut sering muncul dalam bentuk aksi-aksi demo yang tidak jarang berakhir secara anarkhis.

Masyarakat mengharapkan pemerintah melakukan perubahan mendasar yang harus dilakukan secara cepat, efektif dan efisien tanpa memandang situasi kondisi pemerintahan yang ada. Tuntutan terhadap perubahan pemerintahan (Government Change) menjadi sesuatu yang mustahil dihindari.

Sementara di sisi lain, terdapat budaya pemerintahan yang selama ini sering dilayani, bahkan semasa pemerintahan Orde Baru sering disebut bermental pangrecht praja, abdi dalem, dalam waktu yang singkat harus merespon tuntutan masyarakat (people demand) menjadi pemerintahan yang bersifat melayani ,adaptif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan Marijan dalam Ladzi Safroni (2012:9) : " Pada awalnya, memang birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa, dengan tujuan untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan".

Pendapat yang sama Agus Dwiyanto dkk(2006 : 26): " Para abdi dalem tidak melayani kepentingan masyarakat umum, tetapi melayani kepentingan raja (sultan). Orientasi politik dan tugas para abdi dalem semata-mata untuk mendahulukan

kepentingan sultan daripada rakyat banyak. Sikap feodalistik yang diturunkan dari birokrasi kerajaan tersebut sulit terhapuskan dalam masa birokrasi pemerintahan colonial Belanda. Bahkan pada era birokrasi modern saat ini, masih sering ditemukan aparat birokrasi yang sulit bersikap kritis kepada pimpinannya dan cenderung memiliki orientasi nilai pada kepentingan pimpinan, bukannya pada kepentingan publik”.

Hampir setiap hari seluruh jenjang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota harus berhadapan dengan berbagai kelompok kepentingan yang menyampaikan keinginannya, mulai dari cara yang paling lunak berupa anjang sana, temu muka, audiensi, bahkan sampai dengan cara yang paling kasar/keras berupa demonstrasi, unjuk rasa, mogok massal hingga merusak fasilitas umum yang ada.

Melihat fenomena ini, kehadiran sebuah pemerintahan yang baik (good government) dirasakan sangat mendesak. Pemerintahan yang baik dianggap sebagai pintu keluar yang terbaik guna menjawab kebutuhan masyarakat.

Berkembangnya proses reformasi ini melahirkan UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk dilayani, sebagai mana Pasal 18: Masyarakat berhak :” i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”.

Mustafa Lutfi menjelaskan (2011: 11) :

“ Adapun penyelenggaraan pelayanan public yang wajib diselenggarakan oleh Negara/Pemerintah sebagai wujud dari kewajibannya yaitu meliputi, misalnya:

1. Jaminan Pelaksanaan kebebasan warga Negara yang berkenaan dengan pelaksanaan HAM,
2. Jaminan Pelayanan Keamanan Dasar,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

1. Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
2. Dwiyanto Agus dkk, 2005, *Reformasi Birokrasi Publik*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
3. Dunn, William N. 2003. *Analisis kebijakan Publik*. Gadjah mada Univesity Press. Yogyakarta
4. Edward III, George C., 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall
5. <https://gudanglinux.wordpress.com/tag/lkpp/LKPP>
6. <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/09/pengertian-insentif.htm>,
7. http://sambas.staf.upi.edu/2013/01/16/bagaimanakah_menyusun_kerangka_berpikir_penelitian
8. Keban, Y. T., 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* : Konsep Teori dan Isu, Gava Media, Yogyakarta.
9. Kuncoro, Mudrajad, *Strategi*, 2006, Erlangga
10. Ladzi Safroni, 2012, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*, Aditya Media Publishing, Malang.
11. Lubis Zulkarnain, *Penggunaan Statistika Dalam Penelitian Sosial*, 2012, Perdana Publishing, Medan.
12. Masri Singarumbun & Sofian Effendi ,1991, *Metode Penelitian Survai*, LP3 ES, Jakarta.
13. Moleong Lexie J. *Metode penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2005 Bandung
14. Mustafa Lutfi, 2011, *Filosofi pelayanan public*, Setara Press, Malang.
15. M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2012, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta
16. Pawito, dan C Sardjono. *Teori-Teori Komunikasi*. Buku Pegangan Kuliah Fisipol Komunikasi Massa S1 Semester IV. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1994.
17. Sedarmayanti & syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, 2011, Mandar Maju, Bandung
18. Sunggono Bambang, 1994, *Hukum dan kebijaksanaan Publik*, Jakarta, sinar Grafika
19. Sunyoto Danang, 2011, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta, CAPS
20. Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Lemlit Unpad
21. Tachjan, 2006. *Diktat Kuliah Kebijakan Publik*. Bandung
22. *Tribunnews.co.*, Medan, edisi 17 Juli 2012

23. Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
24. Widodo, Joko. 2007. *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia Publishing. Malang
25. Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
26. Winarno, Budi. 2007. *Teori dan praktek kebijakan publik*. Media Pressindo. Yogyakarta

B. Jurnal :

1. *Administrasi Publik dan Pembangunan* , Jurnal Ilmiah Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2013
2. ESSAI Jurnal Ilmiah, 2012, Volume 6 Januari 2012
3. *Journal of Service Research*, Volume 6, No. 4, May 2004 324-335 DOI: 10.1177/1094670503262946 © 2004 Sage Publications
4. *Kesatuan*, Jurnal Ilmiah Volume 4 Nomor 1-2 Pebruari 2003
5. *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah*, Jurnal, 2011, Volume I , Desember 2011, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan:

1. Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Presiden RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah
5. Peraturan Presiden RI. No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

INSTRUMEN PENELITIAN

STUDI IMPLEMENTASI PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN FOKUS METODE PENGADAAN LANGSUNG DAN SWAKELOLA BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SETDA KOTA MEDAN

Petunjuk :

- A. Bacalah petunjuk setiap pertanyaan dan kuesioner ini dengan seksama sebelum saudara memilih jawabannya
- B. Instrumen ini terdiri dari 5 kuesioner ;
 - Kuesioner I adalah isian tentang biodata responden
 - Kuesioner II adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel Struktur Birokrasi
 - Kuesioner III adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel Sumber daya
 - Kuesioner IV adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel Disposisi pelaksana
 - Kuesioner V adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel Komunikasi
- C. Pada setiap pernyataan berilah tanda (X) pada kotak jawaban yang menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara paling sesuai
- D. Untuk menjamin validitas serta akurasi data yang diperoleh, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara mengisi sendiri (tidak berdiskusi)
- E. Mohon diperhatikan bahwa hanya ada satu jawaban (tanda silang) untuk setiap pernyataan jika anda ingin membatalkan jawaban, maka berilah tanda (=) pada jawaban dimaksud, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban pilihan berikutnya
- F. Saya mohon agar Bapak/Ibu/Saudara menjawab pernyataan dibawah ini dengan jujur dan benar karena hasil penelitian ini tidak akan berarti sama sekali apabila jawaban yang diberikan bukan merupakan kenyataan yang sesungguhnya

KUESIONER II. STRUKTUR BIROKRASI

Petunjuk :

Isilah jawaban pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan.

A. Standard Operasional Prosedur (SOP)

1. Tingkat ketersediaan standard operasional prosedur dalam pengadaan langsung dan swakelola :
 - a. Sangat tidak tersedia
 - b. Tidak tersedia
 - c. Tersedia
 - d. Sangat tersedia

2. Tingkat kejelasan/keterbukaan prosedur pengadaan langsung dan swakelola
 - a. Sangat tidak jelas
 - b. Tidak jelas
 - c. Jelas
 - d. Sangat jelas

3. Tingkat kepastian waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan langsung dan swakelola
 - a. Sangat Tidak pasti
 - b. Tidak pasti
 - c. Pasti
 - d. Sangat Pasti

4. Tingkat kemudahan prosedur dalam proses pengadaan langsung dan swakelola
 - a. Sangat tidak mudah,
 - b. Tidak mudah,
 - c. Mudah,
 - d. Sangat mudah

5. Tingkat kejelasan system rekrutmen pejabat dalam proses pengadaan langsung dan swakelola
 - a. Sangat tidak jelas
 - b. Tidak jelas
 - c. Jelas
 - d. Sangat jelas

6. Tingkat kejelasan system penggajian dalam proses pengadaan barang dan jasa
 - a. Sangat tidak jelas
 - b. Tidak jelas
 - c. Jelas
 - d. Sangat jelas



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PROGRAM PASCASARJANA

*Program Studi : Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis
Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi*

Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp.(061) 8201994, Fax.(061) 8226331 Medan 20120

Nomor : 1706 / Wadir.Ak/PPS-UMA/AK/2014

Medan, 7 Maret 2014

Lamp. : -

H a l : **Izin Penelitian**

Yth. Walikota Medan
cq. Badan Litbang Kota Medan
di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan Saudara memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muhammad Alihanafiah
NPM : 121801032
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : ***"Implementasi Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian
Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Medan"***

Untuk melaksanakan Pengambilan data di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai bahan untuk melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Ir. Erwin Pane, MS

Tembusan :

1. Ka. Prodi MAP PPs UMA
2. Mahasiswa YBS.
3. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/206 /Balitbang/2014

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat dari : **Program Pascasarjana UMA** Nomor : 706/Wadir.Ak/PPS-UMA/AK/2014 tanggal : 07 Maret 2014 Perihal : Izin Penelitian.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Muhammad Alihanafiah**
NPM : 121801032
Lokasi : Bagian Administrasi dan Kemasyarakatan Setda Kota Medan
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Administrasi dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Medan.
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Lamanya : 3 (tiga) bulan
Penanggung Jawab : An.Direktur Wakil Direktur Bid.Akademi P.Pascasarjana UMA.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi tempat penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah diizinkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk Hard copy & Soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 17 M a r t 2014

An. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS.



Penyusunan :

1. Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Sdr. Kabag Administrasi dan Kemasyarakatan Setda Kota Medan.
3. Sdr. Wakil Direktur Bid.Akademi P.Pascasarjana UMA.
4. yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/6787

Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Medan menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Alihanafiah

N P M : 121801032

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area

Judul Tesis : Studi Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan Fokus Pengadaan Langsung dan Swakelola Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Kota Medan

Telah melaksanakan pengambilan data pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Kota Medan mulai 7 Pebruari s/d 7 April 2014 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 7 April 2014

An. WALIKOTA MEDAN

